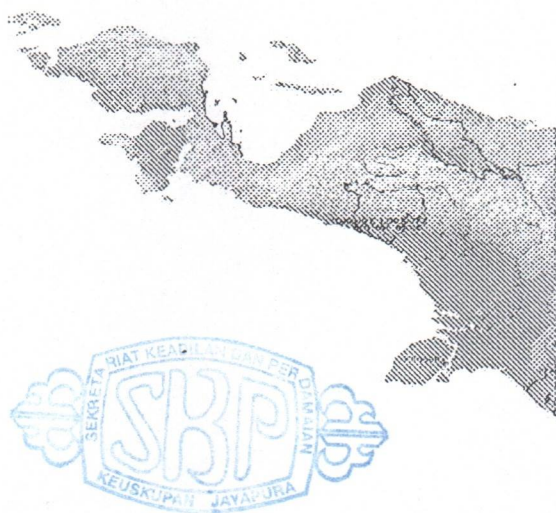


**“PILKADA PAPUA:
PEMBAWA BERKAT ATAU BENCANA?”**



Sekilas Informasi

(Juli - September 2005)

OLEH

**SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA**

Januari 2006

Sepatah Kata

Mengikuti dinamika sosial politik di Tanah Papua yang luas ini tidaklah selalu mudah. Sekretariat Keadilan Perdamaian Jayapura mencoba untuk setia dan tekun dalam mendokumentasikan gambaran aktual masyarakat Papua dari sudut hak asasi manusia. Kejadian demi kejadian terus berlangsung dan kadang sulit untuk dapat seluruhnya dipotret dalam tulisan kecil ini.

Selain itu, kami kembali harus akui keterbatasan kami untuk menyediakan bahan ini kepada para petugas gereja, kelompok-kelompok basis, dan kalayak umum karena desakan kebutuhan lain yang lebih menuntut. Semoga dalam edisi berikut hal ini dapat kami perbaiki.

Teriring salam dan hormat kami,

Rudolf Kambayong ofm
Penulis

Bagian I

Catatan Harian Juli – September 2005

A. Situasi hak-hak sipil dan politik

1 Juli 2005

8 parpol yaitu PPNUI, PNI, Marheinisme, PPDI, Pelopor, PKB, PAN dan PPKD mendeklarasi Aliansi Papua Bersatu di Hotel Yasmin Jayapura.

3 Juli

setelah tertunda beberapa hari akhirnya KPU Kota Jayapura melakukan rekapitulasi dan verifikasi hasil perhitungan suara Se-Kota Jayapura. Sebagai hasil pasangan MR Kambu-H.Sudjarwo BE ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Jayapura periode 2005-2010. Hasil Rekapitulasi perhitungan suara pilkada 28 Juni 2005 sebagai berikut:

➤ MR. Kambu – H. Sudjarwo BE	28.161	suara
➤ Jl. Renyaan – Arobi Aituarauw	25.428	suara
➤ Musa Youwe – Nuralam	22.337	suara
➤ Rustam Saru – Otniel Meraudje	15.354	suara

Aksi penolakan hasil Pilkada Kabupaten Supiori dari hari Jumat, 1 Juli 2005 masih berlanjut. Kepada KPUD Supiori pendemo menyampaikan sejumlah pelanggaran. Ketua KPUD Supiori, Otto Albert Msen meminta kepada para pendemo untuk menyampaikan juga bukti-bukti konkrit. Hasil perhitungan suara yang disampaikan oleh KPUD Supiori sebagai berikut:

➤ Jules F Warikar – Julianus Mnusefer	2703	suara
➤ Joseph Amsamyum – Hengky J. Rumkabu	1749	suara
➤ Hulda Ida Imbiri Wanggober – Isak Mandosir	1179	suara
➤ Abdon Wambrau – David Warfandu	331	suara
➤ Daud Wanma – Theodorus Kmurawak	309	suara

4 Juli 2005

dalam rangka pilkada Gubernur Papua, partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Serikat Indonesia (PSI) mendeklarasikan diri sebagai Koalisi Nusantara. Acara deklarasi berlangsung di Hotel Relat Indah.

Melalui rapat pleno KPUD , pasangan Drs. Celsius Watae – Drs. Waghfir Kosasih, SH terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Keerom periode 2005 – 2010. perolehan suara yang didaat ketika pemilihan sebagai berikut:

➤ Drs. Celcius Watae – Drs. Waghfir Kosasih, SH	8.665	suara.
➤ Yusuf Wally SE, MM – H. Budi Setyanto, SH	7.487	suara
➤ Drs. D. Izak Danya – Ir. Ruben Kombonglangi	2.243	suara
➤ Drs. Ikram Basalem – Octovianus Gusbager	2.192	suara
➤ Drs. B. W. Jamlean – H. Tamsul Makkawaru	1.713	suara

15 Juli

DPRP melakukan rapat paripurna dan mengesahkan Perdasi No. 4 tahun 2005 tentang Tatacara pemilihan Majelis Rakyat Papua. Direncanakan dalam waktu dekat Perdasi tersebut akan disosialisasikan.

21 Juli

Pemerintah Provinsi Papua mensosialisasikan Perdasi No. 4 2005 tentang Tatacara Pemilihan MRP kepada kalangan legislative, eksekutif, Akademisi, LSM, Perempuan dan masyarakat di Aula Diklat Kotaraja. Acara sosialisasi buka sendiri oleh Gubernur Papua, Drs. Jaap Solossa, M.Si.

LP3BH mengeluarkan Surat Terbuka¹ mengenai perkembangan situasi Papua dan secara khusus mengenai rencana aksi DAP tanggal 15 Agustus 2005 beserta isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

26 Juli

Tim Komisi A DPRP mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, Sudarsono di Jakarta. Tim Komisi A DPRP minta agar Depdagri menunda pelaksanaan Pilkada Irian Jaya Barat yang akan berlangsung 28 Juli 2005. Komisi A DPRP juga mengancam akan menggelar referendum jika Depdagri tidak membantalkan Pilkada IJB.

27 Juli

85 mahasiswa yang tergabung dalam Front Revolusioner Mahasiswa Papua di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa menolak Otsus Papua, menolak adanya pemekaran Papua, meminta Pepera 1969 ditinjau kembali dan jika perlu Pemerintah RI menggelar Pepera ulang untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Aksi tersebut kemudian dibubarkan aparat kepolisian kota besar Yogyakarta dan menahan koordinator aksi (AT), juru bicara aksi (YD), pembawa bendera Papua (ON) dan peserta aksi (SH).

29 Juli

Rancangan Undang-Undang Hubungan Internasional Tahun Anggaran 2006-2007 Amerika Serikat yang dikenal dengan H.R. 2601 mengundang tanggapan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Yudhoyono mengaku bahwa telah menerima salinan dan membaca sikap dari anggota DPR Amerika yang mempertanyakan keabsahan Pepera Papua. Namun Presiden sangat menyayangkan salinan RUU H.R. 2601 tersebut telah beredar di Papua dan kemudian diartikan sebagai dukungan Pemerintah Amerika Serikat terhadap gerakan pemisahan Papua dari Indonesia.

Dewan Adat Papua (DAP) menyelenggarakan konferensi pers 19 Juli 2005 di Kafe Prima Garden. Dewan adat Papua menilai bahwa Otsus Papua telah gagal mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Papua. Oleh karena itu Dewan Adat Papua akan mengembalikan Otsus Papua 15 Agustus 2005. Menurut Sekretaris Pemerintah Adat DAP, S. Fadal Alhamid langkah ini perlu

¹ Teks lengkap dapat dilihat pada www.hampapua.org/skp/indexe.html

diambil untuk membuka ruang informasi bagi masyarakat dan sekaligus mencairkan kebekuan komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat adat. Ini penting agar semua pihak kembali berdialog tentang pembangunan, pelanggaran HAM dan keadilan sejarah untuk menyelesaikan masalah di tanah Papua secara menyeluruh.

Dandrem 173/PVB, Kol. Inf. Erfi Triassunu menggelar acara tatap muka dengan Tomas, Toga, KNPI, DPRD Kabupaten Biak-Numfor dan pemerintah di Aula Makorem 173/PVB Biak. Acara tatap muka dilaksanakan untuk menjangkau aspirasi masyarakat dalam rangka program pembinaan territorial TNI AD.

Bagi Gubernur Papua, Drs. Jaap Solossa, M.Si, penilaian DAP bahwa Otsus Papua belum membawa dampak signifikan bahkan tidak ada hasil nyata adalah suatu kebohongan public. "Kami akui apa yang dibuat pemerintah selama ini masih ada kekurangan dan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi masyarakat harus jujur juga mengakuinya bahwa sudah ada hasil-hasil yang dicapai selama ini meski belum maksimal. Masyarakat jangan melihat dari ketidakberesannya saja'.

DPR RI menyatakan kesiapannya untuk melobi ke Kongres AS mengenai persoalan Papua dalam NKRI. " Jadi kita rencanakan pada bulan September akan ke Kongres AS di New York",kata anggota Komisi I DPR RI, Ade Daud Nasition.

Akhirnya para kandidat pasangan bupati Yahukimo, KPUD Yahukimo dan Panitia pemilihan kepala daerah mendapat jalan keluar penyelesaian Pilkada di Yahukimo. 4 kandidat bupati-wakil bupati; Ones Pahabol, SE – Ir. Daniel Rendang, Drs. Robert Wanimbo-Isak Salak, Drs. Ishak L. Hallutu – Lukas Elopere dan Yani – Elpius Hugi, SPd, bersama KPUD Yahukimo dan Kapolres Yahukimo Kopol Aloysius Kowenip bersepakat untuk mengulangi perhitungan suara di Distrik Kurima, Ninia dan Anggruk. Perhitungan suara di Distrik Kurima akan berlangsung pada 1 Agustus 2005 sedangkan di Distrik Ninia dan Distrik Anggruk akan berlangsung pada 2 Agustus 2005.

3 Agustus

Kapolri Jendral Pol. Susanto tiba di Jayapura. Dalam kunjungannya Kapolri mengingatkan Dewan Adat Papua untuk melaksanakan aksi damai pengembalian Otsus Papua harus dalam kerangka NKRI.

5 Agustus

Untuk pengamanan rencana DAP mengembalikan Otsus Papua tanggal 15 Agustus 2005, Polda Papua memberikan bantuan 2 regu Brimob yang diterima secara langsung oleh Kapolres Jayapura, AKBP Robert Djoenso.

Pimpinan agama di Papua mengeluarkan 9 butir seruan kepada berbagai pihak berhubung fakta-fakta yang berkembang dalam masyarakat beberapa bulan terakhir dan komitmen Papua Tanah Damai. *Pertama* mengenai isu yang berkembang seputar tanggal 15 Agustus 2005. *Kedua*, ditemukan adanya upaya-upaya memecah belah masyarakat dengan mengeksploitasi

perbedaan-perbedaan. *Ketiga*, Otsus Papua yang mengalami pergeseran makna dan mengakibatkan kekecewaan mendalam bahkan kemarahan yang bermuara pada rasa tidak percaya pada pemerintah. *Keempat*, rencana DAP menarik perhatian dan akan mengerakan massa ke Jayapura.

6 Agustus

Dewan Adat Papua membuka sidang pleno untuk membicarakan sejauh mana pemberlakuan Otsus Papua dan tampaknya bagi masyarakat Adat Papua. Sidang ini akan berlangsung dari tanggal 6-9 Agustus, bertempat di Aula STT GKI Abepura-Jayapura.

7 Agustus

Gubernur Papua Drs. Jaap Solossa, M.si menghimbau masyarakat agar tidak perlu terlalu takut dan cemas mengenai rencana DAP mengembalikan Otsus. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa.

DPR RI meminta kepada Pemerintah RI agar jangan menganggap remeh pernyataan 2 anggota Parlemen Amerika mengenai Papua. DPR bahkan menganjurkan agar Pemerintah segera membentuk tim lobi bila perlu menyewa pelobi handal demi Papua.

Tiga kepala suku Yahukimo yaitu Yagase Hugi, Kulit Hese gem dan Walago Elopere mendesak KPUD Provinsi Papua untuk menangani secara langsung persoalan pilkada Yahukimo yang sampai sekarang belum selesai.

8 Agustus

Massa melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur IJB dan menuntut Pemerintah Pusat untuk secara tegas menetapkan jadwal Pilkada Gubernur dan Bupati-Bupati di IJB. Hal yang sama juga disampaikan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan, Fredy Numberi yang sempat ditahan oleh massa ketiga akan berangkat kembali ke Jakarta. Kepada masyarakat Menteri Fredy Numberi berjanji untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Ketua-ketua Parpol di Mimika mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Bupati Mimika, Klemen Tinal karena belum melantik DPRD terpilih sebagaimana SK Gubernur Papua, No. 182 tahun 2004, 5 Agustus tentang Peresmian dan Pengambilan sumpah anggota DPRD Mimika periode 2004-2009. Aksi mosi tidak percaya tersebut dilakukan dengan membakar jas para Ketua Parpol di halaman kantor DPRD Mimika.

DAP memajukan jadwal rencana aksi pengembalian Otsus Papua dari 15 agustus 2005 menjadi 12 Agustus 2005. Alasan DAP memajukan untuk menghormati proklamasi kemerdekaan RI yang jatuh pada 17 Agustus.

Presiden Susilo Bambang Yodhoyono dalam pertemuannya dengan tokoh-tokoh Papua di Jakarta menyatakan bahwa RI tidak akan menyerahkan persoalan Aceh dan Papua kepada PBB atau pihak ketiga, karena ini wilayah kedaulatan RI.

Bupati Jayawijaya, Drs. David Hubi yang diduga terlibat melakukan korupsi terhadap negara, menjalani pemeriksaan di Mapolda Papua selama 7 jam.

Tatacara pemilihan MRP disosialisasikan oleh Democratik Center Uncen di Hotel Relat Indah Argapura- Jayapura dari 8-10 Agustus 2005.

9 Agustus

Dalam rangka Hari Masyarakat Pribumi Se-dunia Dewan Adat Papua menyelenggarakan ibadah syukur di kediaman almarhum They Hiyo Eluay. Ibadah ini diikuti oleh 500 orang yang terdiri dari Presidium Dewan Adat Papua, Sekretaris Umum DAP, Leo Imbiri, Ketua Dewan Adat Biak, Mananwir Yan Pieter Yarangga, Ketua Dewan Adat Mamta, Forkorus Yaboisembut, Ketua Adat Sentani, Kelompok Muslim Papua, dan masyarakat lain.

10 Agustus

Kapolda, Irjen Pol Drs. D. Sumantyan HS, SH beserta jajarannya mengadakan rapat tertutup dengan DAP di aula Rupatama Polda Papua. Rapat dipimpin langsung oleh Kapolda. Dalam rapat DAP dan Polda Papua bersepakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama pada tanggal 12 Agustus ketika DAP mengadakan aksi mengembalikan Otsus Papua

11 Agustus

Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Laksamana Madyo Djoko Sumaryono, mengatakan bahwa mengembalikan Otsus Papua bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua. Menurutnya, jika pelaksanaan Otsus Papua belum berhasil baiklah jika dievaluasi dan dikaji secara bersama-sama dimana letak kekurangannya. Hal ini disampaikannya ketika bertatap muka dengan Muspida Papua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di gedung negara Dok V atas Jayapura.

12 Agustus

Proses verifikasi tahap kedua tentang perlengkapan seluruh berkas persyaratan administrasi ke-5 pasangan bakal calon Gubernur Provinsi Papua periode 2005-2010 telah selesai. Pada umumnya semua persyaratan para calon telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan Pansus Pilkada.

Ribuan masyarakat di bawah koordinasi Dewan Adat Papua (DAP) mendatangi kantor DPRP dan menyampaikan aspirasinya bahwa Otsus Papua telah gagal karenanya harus dikembalikan kepada Pemerintah Pusat. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masyarakat Adat di Kabupaten Biak-Numfor dan Manokwari.

13 Agustus

Dalam kaitannya dengan aksi damai Masyarakat Adat ke kantor DPRP tanggal 12 Agustus 2005, Gubernur Papua, Drs. Jaap. Solossa, Msi merasa tersinggung karena nama baiknya dicemari. " Saya sangat sesalkan aspirasi itu, kalau memang bicara ketidakberesan Otsus karena ada masalah dan kendala, mari kita bicara secara baik," kata Gubernur Papua Drs. Jaap. Solossa, M.Si.

Mensegnes, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah akan menyelesaikan masalah Papua secara serius setelah persetujuan perdamaian di Aceh sudah ditandatangani. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah Papua, pendekatan yang diambil menurut Mensegnes, "Kami berharap pendekatan dialog bisa efektif untuk menyelesaikan masalah Papua"..

18 Agustus

3 pasangan Calon Bupati Yahukimo menolak hasil pleno perhitungan suara karena dinilai tidak procedural. Pertama karena pleno tidak melibatkan 3 pasangan lain yaitu Yani-Elpius Hugi SPd, Isak Halatu- Lukas Elopere dan Drs. Robert Wanimbo- Isak Salak. Kedua, karena Ketua KPUD yahukimo, Usman Kobak STh, telah dinon-aktifkan oleh KPU Provinsi menurut surat bernomor 133/P/VIII/SET-KPU/2005 tertanggal 12 Agustus 2005.

22 Agustus

Pemeriksaan Bupati Jayawijaya Drs. David Hubi sebagai saksi selesai dan kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kabupaten Jayawijaya. Berkaitan dengan itu Drs. David Hubi telah tanda tangan Arita Acara Pemeriksaan.

24 Agustus

Tim Mabes Polri yang terdiri dari Kombes Pol, Drs. Tibul Manurung, Kombes Pol Imanudin Yakob, dan Dr. Setyanto melakukan penyelidikan di Polres Jayapura untuk mengumpulkan data dari masyarakat tentang situasi, kondisi keamanan di daerah konflik dalam kaitannya dengan kinerja Polri di daerah tersebut.

Gabungan partai politik PDS, PSI, PKBP dan PKS mendeklarasi Koalisi Lintas Nusantara untuk mendukung pasangan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP dan Drs. Musa,ad. Acara deklarasi berlangsung di Gereja GIDI Kalsis Lembah balim Kabupaten Jayawijaya.

25 Agustus

Gubernur Papua, Drs. Jaap. Solossa, M.Si, melantik Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, Drs. Jhon Tabo dan Metien Towolom, S.Th di Gereja GIDI Tolikara. Pada kesempatan tersebut Gubernur dalam pidatonya memesan kepada para bupati dan anggota dewan agar kurangi perjalanan kelaur daerah dan turunlah ke lapangan agar tahu kondisi masyarakat secara riil karena tujuan pemekaran ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

5 September

Solidaritas Masyarakat untuk Kasus Abepura mengadakan aksi demo ke kantor DPRP. Aksi ini mendesak semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelesaian kasus Abepura agar mendorong putusan pengadilan di Makassar nanti benar-benar mau memperhatikan rasa keadilan terhadap korban dan menghukum pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut. Aksi ini kemudian dilanjutkan dengan mogok makan yang rencananya akan berlangsung selama 3 hari dari 5-7 September 2005.

6 September

MRP yang kini masih menjadi polemik karena telah dijadwalkan waktu pemilihannya, baru mulai mengadakan sosialisasi. Di Distrik Jayapura Utara Kabupaten Jayapura baru saja mensosialisasikan MRP kepada warganya.

DPRP dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura mengadakan dialog interaktif di TV lokal di Makassar mengenai proses persidangan kasus Abepura dalam pengadilan HAM di Makassar dan keadaan pengadilan HAM di Indonesia.

Panitia pemilihan dan Panwas MRP dilantik oleh Wagub, drh. Constan Karma di Gedung Sasana Karya kantor Gubernur. Mereka yang dilantik masing-masing 5 orang Panitia Pemilihan MRP dan 5 orang Panitia pengawas pemilihan MRP.

Hasil Pilkada Teluk Wondama diserahkan kepada Gubernur IJB untuk diproses lanjut oleh Mendagri, sebagaimana dikatakan oleh Ketua DPRD IJB, Daniel Go Marani.

7 September

Pada hari terakhir mogok makan Solidaritas Masyarakat Untuk Kasus Abepura kembali, sekali lagi mengadakan orasi di DPRP. Dalam orasi Negera menghukum tersangka pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap kasus Abepura seberat-beratnya.

Bupati dan Wakil Bupati Asmat Yuven Beakay-Sorring dilantik oleh Gubernur Drs. Jaap. Solossa, Msi. Pada kesempatan kesempatan yang sama dipakai juga untuk mensosialisasi Pemilihan Gubernur yang akan berlangsung beberapa waktu mendatang.

8 September

Menurut Gubernur Papua, Drs. Jaap Solossa, M.Si, 19 bupati-wakil bupati terpilih siap dilantik sedangkan 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Mappi, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Waropen belum bisa dilantik karena hasil pemilunya masih bermasalah.

Terdakwa pelanggaran HAM berat kasus Abepura 7 Desember 2000, Brigjend Pol Johnny Wainal Usman diputuskan bebas oleh Pengadilan HAM Makassar.

9 September

Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Drs. Walington Wenda, M.Si dan Drs. Theodorus Sitokdana dilantik oleh Gubernur Papua, Drs. Jaap Solossa, M.Si di Jayapura.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kasus Abepura melakukan *long march* di Kota Makassar dari *Losari Beach Hotel* menuju Pengadilan Negeri Makassar. Pada waktu yang sama kelompok solidaritas untuk pelanggaran HAM yang terdiri dari para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi juga melakukan aksi di Pengadilan Negeri Makassar sehingga bersama Koalisi Masyarakat Sipil

Untuk Kasus Abepura melakukan prosesi peresmian sekaligus penguburan kasus-kasus pelanggaran HAM di Pengadilan HAM Indonesia.

Terdakwa pelanggaran HAM berat pada kasus Abepura 7 Desember 2000, Kombes Pol Daud Sihombing, SH diputus bebas oleh pengadilan HAM Makassar.

Yayasan Pemberdaan Anak dan Perempuan Papua bekerjasama dengan DPRD Kota Jayapura menyelenggarakan sosialisasi perekrutan anggota MRP di aula DPRD Kota Jayapura. Tema sosialisasi, "Membangun Kebersamaan Perempuan dalam mengisi MRP tanpa konflik di daerah pemilihan wilayah VIII dan IX. Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Kota Jayapura, Sarlota Sesa S.Th, perekrutan anggota MRP terkesan mendadak dan kurang tersosialisasi dengan baik. Keadaan ini berpotensi mendatangkan konflik di kalangan perempuan.

10 September

Gerakan Perempuan Papua Sejahtera (GPPS) yang dibentuk 1 Agustus 2005 secara resmi dideklarasikan di Sekretariat GPPS Jl. Raya Abepura No. 9 Entrop Jayapura. Menurut Ketua GPPS Wihelmina Wanggober, 'GPPS dibentuk sebagai wadah untuk menampung hak-hak sejahtera dan kebersamaan di kalangan birokrat, legislatif, hukum, dunia politik juga di tengah-tengah masyarakat. Dan ingin secara aktif dan nyata terlibat dan diakui dalam proses pembangunan baik itu ditingkat Kota Jayapura, Provinsi Papua maupun secara Nasional". Pengurus GPPS terdiri dari kaum perempuan yang merupakan kader, simpatisan dari 6 partai politik pendukung pasangan calon Gubernur Papua D.H. Wabiser dan Wakil Gubernur Ir. S.P. Inaury, M.si. Menurut Ketua Kampanye pendukung pasangan Gubernur D.H Wabiser- Ir. S.P. Inaury, M.si, Budi Baldus Waromi, GPPS adalah wadah gerakan moral dalam rangka pembelajaran politik bagi kaum perempuan.

Sekjen PDP Thaha Alhamid, menanggapi pernyataan Gubernur Papua, Drs. Jaap. Solossa, M.si mengenai penundaan pilkada karena kepentingan politik tertentu. Kata Thaha Alhamid, "Kalau berbicara seperti itu jangan memaksakan satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, di satu sisi Gubernur mengatakan Otsus 2001 sudah keputusan final, tapi sekarang berdalih lagi dengan undang-undang 32 tahun 2004, justru disitu kelihatan sekali ada kepentingan politik". Selaku Sekjen PDP, Thaha juga tidak setuju dengan pandangan harus orang Papua yang menjadi calon pada pilkada Gubernur karena banyak orang pejabat Papua yang pekerjaannya keliling daerah terus. Bagi Thaha, Papua perlu pejabat yang punya hati nurani bagi orang Papua.

13 September

Pusat Kajian dan Pengembangan Parlemen (PKPP) yang berkerja sama dengan Forum Komunikasi Massa DPR menyelenggarakan seminar yang bertema: "Implementasi Otonomi Khusus Papua dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua". Maksud seminar ini untuk mengkritik kebijakan Pemerintah terhadap Otsus dan Penundahan Pilkada Gubernur IJB. Ketua Komisi II DPR RI Ferry Mursyidan Baldan yang ikut dalam seminar

tersebut mengatakan bahwa Pilkada sebaiknya tidak dikaitkan dengan MRP karena keduanya berbeda. Menurut Ferry Pilkada di IJB tidak perlu menunggu MRP, solusinya tambahkan satu pasal dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua.

12 September

Dalam kaitannya dengan rencana pembacaan Putusan Perkara Kasus Abepura di Pengadilan HAM Makassar tanggal 8-9 September 2005, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk kasus Abepura dan Masyarakat korban mengadakan jumpa pers di kantor KontraS Papua di Padang bulan Jayapura.

Panitia Pemilihan dan Pengawasan MRP sebanyak 55 orang dari 11 Distrik di Kabupaten Merauke di lantik oleh Asisten 1 Sekda Merauke atau nama Bupati Merauke.

15 September

Calon Gubernur IJB, Drs. Dortheus Asmuruf – Drs. Ali Kastella, MMT melakukan kampanye di lapangan bola Borarsi Manokwari. Dalam kampanye kedua calon berjanji untuk melakukan perubahan di segala sektor.

87 tokoh-tokoh agama se tanah Papua yang terdiri dari 20 tokoh Kristen, 23 tokoh Katolik, 22 tokoh Islam, 11 tokoh Hindu, 11 tokoh Budha dalam rangkai Hari Damai Sedunia menyampaikan Pernyataan Bersama sebagai tokoh-tokoh agama Se-Tanah Papua yang terdiri dari 7 pokok keprihatinan, 7 poin harapan dan 3 komitmen.²

30 September 2005

Hasil Pilkada Kabupaten Raja Empat ditolak oleh pasangan Daniel Daat-M.Yasin Helmi Ihamahu, pasangan Nomensen Mambraku – Karel Roney Kardinal dan pasangan Lindert Imbir – Abdul Rahman dan diminta KPU setempat melakukan pemilihan ulang di TPS Yellu dan Tomolol Distrik Misool Timur Selatan. Penolakan tersebut dikarenakan pemilih tidak sesuai dengan daftar pemilih yang diedarkan. Adapun penolakan tersebut secara resmi disampaikan ke Pengadilan Tinggi untuk diproses secara hukum.

19 September 2005

Pemerintah Pusat memutuskan untuk mengundurkan jadwal Pilkada Provinsi Papua dan IJB dari 29 Agustus 2005 ke 7-10 Oktober 2005. Menurut Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Sudarsono, disebabkan karena distribusi logistik pemilihan masih belum tersebar secara merata.

Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari mulai berlangsung. Menurut jadwal kampanye akan berlangsung dari tanggal 20 September sampai 2 Oktober 2005. Berkaitan dengan itu Ketua Pengawas Pilkada, Meilisa STh meminta kepada keempat kandidat masing-masing Ir. Herman Orisu-Aliyuddin, Drs. Dominggus Mandacan – Ir. Dominggus Buiney, Yusuf Sawai SH – Winnih Mangkuwiyono, Hugo Rumander – Priyo Handoko

² Teks selengkapnya dapat dibaca pada www.hampapua.org/skp/indexd.html

dan Yaconias Sorbu – Simon Saiba untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

20 September

Kampanye perdana calon bupati Herman Orisu – Aliyudin dilaksanakan di lapangan sepak bola Borarsi. Materi kampanye yang disampaikan kepada masyarakat adalah tentang pelaksanaan pemerintahan, pengisian jabatan, masalah tanah dan proyek-proyek.

Masyarakat pendukung Bupati Jayawijaya, Drs. David. A. Hubi, melakukan demonstrasi di DPRD Jayawijaya. Tiga aspirasi yang disampaikan (1) menolak dengan tegas aksi masa sejak 15 – 19 September 2005 yangmana meminta untuk menonaktifkan Bupati Drs. David Hubi. (2) Masa jabatan bupati periode 2003-2008 harus tetap dilanjutkan dan (3) untuk Bupati periode berikut haruslah dipimpin oleh orang pendatang, bukan putra daerah.

21 September

Dalam rangka memperingati Hari Damai Sedunia, 21 September 2005 para pemimpin agama di tanah Papua mengeluarkan Pernyataan Damai. Kepada semua umat beragama diajak untuk tidak memaknai kata damai sebatas kata penyejuk melainkan damai mesti menjadi budaya dalam hidup semua umat sesuai dengan perintah Tuhan melalui agama masing-masing. Dalam kaitannya dengan berbagai gejolak sosial dalam masyarakat seperti polemik Otsus, harga BBM yang terus naik, mahalnya obat-obatan, pendidikan, tingkat kematian ibu dan anak karena kurang gizi, epidemik HIV/AIDS, miras korupsi, kekerasan-kekerasan di mana-mana, kecurigaan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat, kepada seluruh pihak pemimpin agama menyerukan agar tetap memiliki pengharapan dan berupaya bersama mencari jalan keluar dengan cara-cara dialog damai.

22 September 2005

Solidaritas masyarakat untuk kasus Abepura yang menamakan dirinya Solidaritas Nasional Untuk Kasus Abepura (SNUKA) mengadakan aksi demo damai ke DPRP. SNUKA meminta kepada DPRP untuk memfasilitasi menyampaikan aspirasinya kepada Presiden RI. Bahwa masyarakat dan seluruh penegak demokrasi sangat kecewa atas putusan Pengadilan HAM Makassar. Namun masyarakat masih ingin agar proses ini terus diproses secara hukum.

Walaupun waktu pelaksanaan pemilihan masih terus dipolemik karena ada yang menilai terlalu lambat sementara ada juga yang menilai terlalu tergesah-gesah namun sosialisasi pemilihan sudah di mulai seperti di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

Bupati Nabire Drs. Ap. Youw membuka sosialisasi pemilihan MRP di Gedung Diklat Pemerintah Kabupaten Nabire.

25 September

Panwas Pilkada Manokwari menegur semua tim sukses dan pasangan bupati karena melibatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kampanyenya. Teguran ini berhubungan dengan keberatan pasangan lain.

Proses pelantikan Bupati Mappi masih bermasalah. Ketua KPUD Mappi, Lodifikus Bapaimu menegaskan hal ini bahwa proses hukum terhadap calon bupati terpilih sedang berlangsung, dimana Mahkamah Agung diminta untuk meninjau kembali hasil Keputusan Pengadilan Tinggi di Jayapura.

Koalisi 14 parpol mendatangi DPRD Supiori dan minta agar memfasilitasi pertemuan antar para kandidat bupati guna mencari solusi bersama menyelesaikan persoalan pilkada.

B. Situasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

3 Juli

Wakil Ketua MPR-RI, Aksan Mahmud bersama 9 anggota MRP-RI melakukan kunjungan kerja ke Manokwari guna mensosialisasikan sejumlah ketetapan MPR-RI dan Amandamen UUD 1945. Sosialisasi tersebut diperuntukan kepada para eksekutif dan para pendidik dari SD sampai Perguruan Tinggi.

Dari 1457 Peserta Ujian Akhir Nasional dari SMU/SMK di kota Jayapura hanya 939 siswa yang dinyatakan lulus. Sedangkan untuk tingkat SLTP dari 1746 yang mengikuti Ujian Akhir Nasional yang berhasil lulus 1190.

11 Juli

Penyakit muntaber menyerang Kabupaten Asmat, melanda 27 kampung yang meliputi 5 Distrik yaitu Distrik Pantai Kasuari, Distrik Sawa-Erma, Akat, Atsy dan Distrik Fayit. Penyakit yang telah menjangkit sejak pertengahan Juni 2005 kini telah menelan korban 25 orang balita sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Tohab Capa.

22 Juli

Ada 12.834 desa/kampung di Provinsi Papua yang ditetapkan sebagai penerima dana kompensasi BBM. "Program ini merupakan kompensasi dari pengurangan BBM yang dilakan oleh pemerintah beberapa waktu lalu", kata Sekretaris Komisi B DPRP Idrus Khalwani. 12.834 kampung yang menerima dana kompensasi BBM tersebut masing-masing:

- | | | |
|---------------------------|----|---------|
| • Kabupaten Merauke | 50 | kampung |
| • Kabupaten Jayawijaya | 59 | kampung |
| • Kabupaten Jayapura | 45 | kampung |
| • Kabupaten Nabire | 45 | kampung |
| • Kabupaten Yapen Waropen | 45 | kampung |
| • Kabupaten Biak Numfor | 45 | kampung |
| • Kabupaten Paniai | 43 | kampung |
| • Kabupaten Puncak Jaya | 47 | kampung |
| • Kabupaten Mimika | 40 | kampung |

• Kabupaten Boven Digoel	44	kampung
• Kabupaten Mappi	49	kampung
• Kabupaten Asmat	49	kampung
• Kabupaten Yahukimo	59	kampung
• Kabupaten Peg. Bintang	45	kampung
• Kabupaten Tolikara	53	kampung
• Kabupaten Sarmi	43	kampung
• Kabupaten Keerom	36	kampung
• Kabupaten Waropen	39	kampung
• Kabupaten Supiori	34	kampung
• Kota Jayapura	14	kampung

8 Agustus

30 guru honor melakukan aksi unjukrasa di halaman Kantor DPRD Kabupaten Supiori. Para pengunjukrasa meminta agar gaji mereka yang selama 6 bulan bayar segera diselesaikan.

Suku Weta mendatangi kantor DPRD Kabupaten Nabire untuk menuntut hak ulayat atas lokasi pelabuhan laut yang baru dibangun. Menurut Kepala Suku Weta, Yulianus Waray, persoalan ini pernah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Nabire tetapi tidak ada tanggapan.

10 Agustus

Dalam kaitannya akan disalurkan Dana Kompensasi BBM, pemerintah Kota Jayapura menyelenggarakan acara sosialisasi pendataan sosial ekonomi penduduk 2005 di Aula Serbaguna Kantor Walikota Jayapura. Dalam acara tersebut dikatakan oleh Asisten I Sekda Kota Jayapura, Drs. H. Margono, SH.MM bahwa pemerintah telah menentukan dua strategi yaitu meningkatkan pendapatan penduduk dan mengurangi beban hidup penduduk miskin. Karenanya untuk Kota Jayapura diperlukan data penduduk miskin yang handal.

Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke RSUD Dok II Jayapura. Rombongan Komisi IX RI diterima langsung oleh Wakil Gubernur Papua, drh. Constan Karma. Dalam kunjungan kerja 2 jam di RSUD Dok II Jayapura Komisi IX menanyakan upaya-upaya pelayanan kepada masyarakat dan besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pelayanan tersebut. Dalam upaya pelayanan kesehatan, Komisi IX mengenyurkan agar lebih memperhatikan pelayanan masyarakat di daerah-daerah pedalaman yang minim akan tenaga kesehatan.

RSUD Dok II Jayapura mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 100 Miliar. Menurut Direktur RSUD Dok II, dr. Paulina Watopa, "Untuk membangun RSUD Dok II Jayapura menjadi Rumah Sakit pendidikan, itu kita tidak bisa lakukan sekaligus tapi pembangunan dan sarannya dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Tapi yang pasti anggaran yang diberikan pemerintah Provinsi pada 2005 cukup besar".

12 Agustus

Direktur RSUD Dok II, dr. Paulina Watopa menyampaikan bahwa RSUD Dok II masih kekurangan tenaga dokter. Dari 50 tenaga yang seharusnya ada, RSUD Dok II hanya mempunyai 17 dokter. Guna pengembangan ke depan RSUD Dok II mendapat masukan dana dari APBD sebesar Rp.100 miliar namun tidak semua dikelola oleh RSUD Dok II. RSUD Dok II hanya mengelola Rp. 42 miliar yang diperuntukan untuk pembelian obat-obatan, perlengkapan alat-alat dan makanan pasien.

13 Agustus

Kasubdin Bina Pendayagunaan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Drs. Yuruf Serang, menyampaikan bahwa jumlah pencari kerja di Provinsi Papua terus meningkat karena minimnya lapangan kerja. Adapun jumlah pencari kerja di Provinsi Papua mencapai 98.156 orang.

Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Papua (Bikda) bekerjasama dengan ASA menyelenggarakan penyuluhan HIV/AIDS di Pasar Inpres Dok IX, Kelurahan Tanjung ria Jayapura Utara. kepada masyarakat diputar film Mencari Madona. (cari data HIV/AIDS terbaru)

14 Agustus

100 tahun Gereja Katolik masuk di Kabupaten Merauke diperingati dalam suatu Misa Kudus meriah di lapangan Hanasab Sai Merauke. Hadir perayaan tersebut mantan Uskup Agung Merauke, Mgr. Emiritus Deenvoorde, MSC, Duta Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Micolm Ranjith, Dirjen agama Katolik, Drs. Steven, Gubernur Papua JP. Solossa, Msi, Wakapolda Papua, Brigjen Pol. FA. Purwoko, Kajari Papua Sohartoyo, SH, Pejabat Bupati Merauke Drs. Tedjo Suprpto para Muspida dan Bupati terpilih Drs. John Gluba Gebze. Kurang lebih 30.000 yang hadir mengikuti perayaan tersebut.

22 Agustus

Ujian Akhir Nasional tahap II berlangsung di Kabupaten Jayapura, Keerom dan Kabupaten Biak Numfor sebagaimana yang ditetapkan akan berlangsung dari 22-24 Agustus 2005 secara serentak.

23 Agustus

penyebaran virus HIV/AIDS di Kabupaten Biak Numfor sudah masuk dalam kategori rawan. Data kasus HIV/AIDS di Kabupaten Biak Numfor tercatat 110 kasus. Menurut Ruslan SKM, surveilans HIV/AIDS Diskes Biak Numfor "Privalensi penyebaran HIV/AIDS di Biak cukup tinggi bila kita bandingkan dengan angka nasional yang hanya mencapai 1 persen". Menurut data Juli 2005 tercatat 93 kasus di kabuapten Biak Numfor dan bulan Agustus 2005 telah ditemukan lagi 17 kasus.

Menurut Kepala badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Ir. J.A. Djarot Soetanto, MM, jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua 2004 mencapai 966.000 jiwa dari total penduduk Papua 2.516.000 jiwa.

25 Agustus

Warga sekitar Danau Sentani memalang Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBH) Sentani, pukul 09.00 WIP. Masyarakat protes karena tidak dapat membeli bensin dengan menggunakan jerigen.

Puskesmas Undi dan Pasi Kabupaten Biak Numfor belum ada tenaga medis. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor, Drs. Sefnath Korwa. Atasi masalah ini 63 tenaga perawat jika berhasil menyelesaikan pendidikannya tahun ini akan disebarkan ke unit pelayanan kesehatan masyarakat. Seperti yang dikatakannya, "Rencananya kita berharap mereka bias turun ke unit pelayanan masyarakat seperti Pustu dan Puskesmas melalui program magang".

7 September

Gubernur Papua Drs. Jaap. Solossa, M.Si minta agar masyarakat Papua memaklumi kenaikan BBM.

1.130 pelajar-mahasiswa Kabupaten Jayapura menerima beasiswa dari dana Otonomi Khusus Papua.

8 September

Terdakwa pelanggaran HAM berat pada kasus Abepura 7 Desember 2000, Brigjend Pol Johnny Wainal Usman diputus bebas oleh pengadilan HAM Makassar.

9 September

Terdakwa pelanggaran HAM berat pada kasus Abepura 7 Desember 2000, Kombes Pol Daud Sihombing, SH diputus bebas oleh pengadilan HAM Makassar.

Kepala Dinas P dan P Kabupaten Jayapura, Jack R. Ch. Ayamiseba menegaskan bahwa demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Jayapura, pihaknya akan menutup sekolah-sekolah yang tidak bersyarat.

12 September

Perwakilan Distrik Kosarek dan Distrik Nipsan mengalami kelaparan karena kekeringan yang melanda wilayah tersebut, telah berlangsung 6 bulan terakhir. Anggota DPRP Yahukimo, Otis Kambue telah melaporkan keadaan ini kepada pemerintah; kepada Sekda, kepada Dinas Sosial tetapi tidak ada tanggapan positif. Sebagai akibat dari bencana kelaparan tersebut banyak masyarakat sakit-sakitan dan ada yang telah meninggal dunia sebagaimana disampaikan oleh Amos Kepala Pustu di Wilayah itu.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Bupati Jayawijaya Drs. David Hubi sebagai tersangka kasus korupsi diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kondisi jalan Tami – PIR IV Distrik Arso Kabupaten rusak berat. Kondisi ini diperparah lagi ketika turun hujan. Menurut Ketua DPRD, Kondrad Gusbager, S.si DPRD telah mengirim surat kepada Bupati dan meminta agar ruas jalan yang rusak segera diperbaiki. DPRD juga akan berbicara kepada Pihak kota

Jayapura dan Provinsi Papua agar sama-sama menyelesaikan persoalan ini karena status jalan bermasalah ini juga menjadi tanggungjawab bersama.

Dalam kaitannya dengan akan dibacakan Putusan Perkara Kasus Abepura i Pengadilan HAM Makassar tanggal 8-9 September 2005, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk kasus Abepura dan Masyarakat korban mengadakan jumpa pers di kantor Kontras Papua di Padang bulan Jayapura.

Sudah 5 bulan proses belajar-mengajar di SD Inpres Aprawi Distrik Sinopi Kabupaten Manokwari tidak berjalan. Hal ini dikarenakan 4 guru SD tersebut meninggalkan tempat tugas tanpa alasan yang jelas. Para orang tua murid resah dan mengharapkan agar kepala dinas terkait segera mengingkapi persoalan ini.

19 September

Karena tidak puas dengan pembagian uang pelayanan unit-unit di RSUD Manokwari, para perawat berdemo dan melakukan mogok kerja. Aksi mogok para perawat antara lain dilakukan dengan memalang UGD.

20 September

Berkaitan dengan banjir yang terus meneus melanda Kabupaten , Ketua DPRD , Drs. Kondrad Gusbager, S.si, menegaskan bahwa salah satu tugas pemerintah definitif nanti adalah penanganan banjir, dalam hal ini Pemerintah harus mempunyai konsep mengenai pengelolaan air yang tepat.

Warga BTN Pemda Ridge I mengeluhkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena beberapa bulan tidak mendapat pelayanan air bersih. Hal ini tanggapi Direktur PDAM bahwa air tersebut dipadamkan karena dari 97 pelanggan air, 75 % belum melunasi kewajibannya.

Masyarakat pendukung Bupati Jayawijaya, Drs. David. A. Hubi, melakukan demonstrasi di DPRD Jayawijaya. Tiga aspirasi yang disampaikan (1) menolak dengan tegas aksi masa sejak 15 – 19 September 2005 yangmana meminta untuk menonaktifkan Bupati Drs. Davis Hubi. (2) Masa jabatan bupati periode 2003-2008 harus tetap dilanjutkan dan (3) untuk Bupati periode berikut haruslah dipimpin oleh orang pendatang, bukan putra daerah.

23 September

Puluhan Pengusaha Putra Daerah dengan kantor Dinkes Provinsi, menuntut agar pembagian proyek diatur melalui kompromi yang sah. Puluhan pengusaha ini menilai bahwa selama ini banyak terjadi konspirasi dalam dinas, bahkan dinas bertindak bagai mafia guna memperoleh keuntungan yang besar. Pendemo juga menyatakan menolak Kepres 80 dan mendesak agar segera menggunakan UU Otsus No. 21.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Provinsi Papua berjumlah 55 miliar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua P dan P Provinsi Papua, Drs. James Mandouw,” Dan BOS sebesar 27 miliar itu telah didistribusikan kepada 12 Kabupaten yang ada di Provinsi Papua melalui rekening sekolah masing-masing. Penyalurannya dibantu oleh Bank Rakyat

Indonesia dan kantor PT. Pos Indonesia". Menurutny kepada 8 Kabupaten akan disetor hari Senin, 26 September 2005.

25 September

Kelompok Penuntut Penegak Hukum dan Pembela Kebenaran (KPPHPK) Kabupaten Jayawijaya menyatakan menolak dengan tegas penahanan Hamzah, SE dan Christina. T, karena penahanannya tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Wamena juga tidak menggunakan laporan-laporan yang masuk sebagai bahan pertimbangan dalam kasus, sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPPHPK Natalis Dogo.

Rumah Sakit Dian Harapan Waena menyelenggarakan pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para perawat agar memperhatikan pelayanan secara khusus kepada Balita yangmana angka kematiannya sangat tinggi, demikian disampaikan oleh Kepala *unit Public Health Care* (PHC) Rumah Sakit Dian Harapan Waena, dr. Evi Tokiri.

26 September

Para perawat dan dokter RSUD Abepura mogok kerja. Para pemogok kerja menuntut agar Direktur RSUD Abepura, dr. A.K. Mallisa. R segera mundur dari jabatannya karena nilai tidak profesional, sebagai penyebab konflik interen, mementingkan diri sendiri dan tidak memperhatikan hak-hak tenaga medis dan non medis. Sebagai akibat pelayanan di bagian polik dan laboratorium tidak jalan.

Dalam kunjungan kerja Wagub Papua, Constan Karma di Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura, masyarakat setempat keluhkan soal pendidikan di wilayah itu bahwa banyak guru sering tidak ada di tempat.

27 September

Menurut kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, drg. Joseph Rinta, R.M, jumlah penduduk di Kabupaten Merauke sebanyak 172.000 dan yang tercatat sebagai penduduk miskin sebanyak 77.930 jiwa. Dari 77.930 jiwa yang mendapat Asuransi Kesehatan (Askes) baru sebanyak 43.784 jiwa sedangkan 34 ribu jiwa belum terdaftar.

29 September

Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 Oktober 2005 diprotes oleh Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) dan Solidaritas Mahasiswa Peduli BBM Se-Papua. Aksi tersebut berlangsung di kantor DPRP. Para mahasiswa menolak dengan tegas rencana kenaikan BBM dan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa pejabat pertamina dan secara khusus di Papua kepolisian diminta untuk mengusut tuntas para penimbun BBM.

Lebih dari 600-an petani PIR PTPN II Arso berunjuk rasa ke kantor DPRP. Para pendemo yang tergabung dalam Forum Peduli Nasib Petani yaitu petani PIR, KKPA, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASIDO) dan pemimpin umat Katolik di Arso. Pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah

dan instansi terkait memperhatikan harga Tandan Buah Segar (TBS) dengan menentukan harga standar dengan memperhatikan perbandingan harga di luar Wilayah Papua.

Bagian II

Analisis di balik peristiwa

Wajah Papua pada Triwulan Juli-September 2005 tidak jauh berbeda dengan Triwulan Januari-Maret dan April-Juni 2005. Pilkada masih menjadi tema yang mendapat sorotan baik Pilkada di Provinsi Papua maupun di "Irian Jaya Barat". Otonomi Khusus Papua juga mendapat sorotan dalam kaitannya dengan Pilkada dan MRP. Sementara dua tema khusus yang menarik perhatian dalam triwulan paruh ketiga tahun 2005 adalah 12 Agustus 2005 menyangkut sikap Dewan Adat Papua dan RUU Amerika Serikat H.R. 2601. Dua tema ini menyita banyak tenaga dan perhatian berbagai unsur di tingkat lokal Papua dan juga di tingkat nasional.

Hal lain yang juga mewarnai catatan triwulan paruh ketiga 2005 adalah kebijakan pemerintah menyangkut kenaikan drastis BBM, persoalan-persoalan mendasar, bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Tema-tema di atas diuraikan sebagai berikut.

A. Hak Sipil-Politik

1. Hak turut berpartisipasi dalam pemerintahan

Sepintas lalu tahun 2005 bisa dikatakan sebagai tahun "gerbang demokrasi" bagi Papua. Jadwal pemilu di Papua padat dari Pilkada bupati, pemilihan menyangkut MRP dan rencana pemilihan gubernur. Apakah gerbang yang telah dibuka dapat diberi bobot demokrasi secara benar, tidak terlalu sulit untuk menjawabnya. Khusus untuk Pilkada bupati, triwulan Juli-September secara jelas mencatat bahwa hampir di semua Wilayah Pulau Papua terdengar suara memprotes hasil Pilkada. Misalnya yang terjadi di Pemerintahan Kota Jayapura dimana hasil rekapitulasi jumlah suara dan penandatanganan berita acara dipersoalkan, di Kabupaten Supiori disinyalir ada indikasi politik uang, ketidakberesan juga terjadi di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Raja Empat dan persoalan Pilkada Kabupaten Mappi yang diselesaikan melalui jalur hukum. Walaupun begitu banyak protes satu demi satu persoalan coba diselesaikan. Pada akhirnya 19 calon terpilih dari berbagai wilayah Pilkada dinyatakan siap untuk dilantik, sementara Waropen, Supiori dan Yahukimo masih terus bermasalah.

Masih dalam suasana saling protes terhadap hasil Pilkada bupati-walikota, partai-partai politik sudah sibuk lagi untuk Pilkada Gubernur. Pada tanggal 1 Juli 2005 8 partai politik yaitu PPNUI, PNI, Marheanisme, PPDI, Pelopor, PKB, PAN dan PPDK mendeklarasikan diri sebagai Koalisi Papua Bersatu. Tanggal 4 Juli parpol-parpol lain, Partai Damai Sejahtera, Partai Keadilan Sosial, Partai Serikat Indonesia, juga mendeklarasikan diri sebagai Koalisi Nusantara. Tidak ketinggalan sekelompok perempuan Papua yang bersedia mengambil bagian secara nyata dalam dunia perpolitikan mendeklarasikan dirinya sebagai Gerakan Perempuan Papua Sejahtera (GPPS) yang siap terjun dalam Pilkada Gubernur mendatang.

Sementara itu, KPUD Provinsi telah melakukan proses verifikasi tahap kedua untuk melengkapi persyaratan administrasi para kandidat Gubernur. KPUD Provinsi juga menyatakan bahwa ke-5 kandidat telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan Pansus Pilkada. Dari segi penjadwalan Pilkada, langkah yang diambil KPUD Provinsi dan Parpol-Parpol untuk segera mempersiapkan Pilkada Gubernur telah sesuai dengan jadwal. Tetapi jika melihat suasana Pilkada Bupati karena ada persoalan yang belum tuntas, akan sangat mengganggu proses Pilkada Gubernur apalagi jika mau mengharapkan pilkada berlangsung lancar. Hampir tidak ada kesempatan bagi parpol, pihak penyelenggara pemilu dan masyarakat sendiri untuk mempersiapkan diri secara baik mengikuti Pilkada nanti. Paling tidak pengalaman protes berbagai pihak menjadi pelajaran berharga untuk mengambil langkah-langkah yang tepat agar persoalan yang sama tidak perlu terjadi lagi. Sebut saja misalnya aspek pengawasan³ terhadap proses Pilkada Bupati yang sangat lemah.

Sementara itu Pilkada di Wilayah Irian Jaya Barat tetap menjadi persoalan tersendiri. Walaupun kampanye Gubernur IJB dan Bupati untuk beberapa kabupaten telah berlangsung, tetap saja pelaksanaan Pilkada adalah bagian tersendiri yang berkaitan langsung dengan UU RI No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Keterkaitan ini membuat Komisi A DPRD secara tegas meminta kepada Depdagri untuk segera membatalkan rencana Pilkada Gubernur IJB dan menunggu sampai MRP terbentuk. Mengingat pemerintah Pusat sering acuh tak acuh terhadap permintaan seperti itu membuat Komisi A DPRD harus meminta sambil mengancam bahwa jika Depdagri tetap saja mempertahankan niatnya untuk terus mendorong terselenggaranya Pilkada IJB, DPRD akan menggelar referendum. Syukurlah, pihak Depdagri menanggapi permintaan Komisi A DPRD secara positif dan menunda pelaksanaan Pilkada IJB sampai MPR terbentuk.

Apa yang dapat dimengerti dari kebijakan Depdagri membatalkan pilkada IJB ? Apakah pembatalan IJB karena ada ancaman referendum dari DPRD atau karena memang mengerti duduk persoalan bahwa secara hukum Pilkada IJB tidak boleh berlangsung sampai terbentuknya MRP ? Jika pembatalan karena adanya ancaman DPRD maka kebijakan Depdagri adalah kebijakan "KJ" (Kurang Jelas). Seakan-akan pembatalan pilkada bukan persoalan salah mempraktekan UU RI No.21 tahun 2001 tentang Otsus Khusus Papua, bahwa pemekaran Papua harus melalui pertimbangan Majelis Rakyat Papua telah terbentuk.⁴

Sejalan dengan pembatalan Pilkada IJB, perangkat pemilihan MRP mulai disiapkan. DPRD mengeluarkan SK bernomor 3 tahun 2005 tentang jadwal pemilihan anggota MRP dan Pemilu Gubernur. Jadwal menurut SK tersebut terdiri dari 3 bagian besar (1) 15-29 Juli untuk penetapan Perdasi No.4/2005, sosialisasi Perdasi, pelatihan bagi pelatih fasilitator di 29 kabupaten/kota, pembentukan panitia pemilihan di tingkat Distrik, kabupaten/kota dan

³ Baca Triwulan April-Juni 2005, "Bahaya illegal logging di Papua", hlm.39

⁴ Bdk UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Ostus Papua, BAB XXIV pasal 76.

provinsi serta sosialisasi di 3.805 kampung. (2) Tanggal 5-31 Agustus untuk musyawarah guna menentukan wakil dari segala jenjang untuk kemudian ditetapkan. Dan (3) tanggal 4-30 September untuk melakukan pemilihan tahap kedua di 14 wilayah pemilihan, memilih wakil-wakil dari segala jenjang dan menetapkan wakil terpilih oleh Bupati/Walikota, wakil agama dan Gubenrnur serta pengesahan anggota MRP.

Walaupun media masa terus menampilkan polemik seputar pemilihan MRP namun proses pemilihan terus berjalan, seakan-akan jadwal yang telah ditetapkan adalah harga mati yang tidak boleh diganggu gugat. Tidak mengherankan jika di beberapa tempat sosialisasi tatacara pemilihan mulai diselenggarakan. Democratic Center Uncen melakukan sosialisasi di Hotel Relat Indah Argapura Kabupaten Jayapura, Yayasan Pemberdayaan Anak dan Perempuan Papua yang bekerjasama dengan DPRD Kota Jayapura mensosialisasi di Aula DPRD kota Jayapura, dan Pemerintah Provinsi Papua melakukan sosialisasi pemilihan MRP kepada kalangan legislatif, eksekutif, akademisi, Perempuan, LSM dan masyarakat di Aula Diklat Kotaraja Kabupaten Jayapura. Sementara di tingkat pemerintah Distrik, juga mulai mensosialisasikan hal yang sama seperti di Distrik Jayapura Utara.

Pada proses yang lain Wakil Gubernur Papua, drh. Constan Karma melantik Panitia pemilihan dan Panwas MRP tingkat Provinsi di Gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Papua. Sementara di Kabupaten Merauke, Bupati Merauke melalui Sekda 1 melantik panitia pemilihan MRP dan Panwas dari 11 Distrik sebanyak 55 orang.

Tentang pemilihan MRP baik jadwal pemilihan maupun prosesnya mendapat tanggapan bermacam-macam. Sebagian pihak menilai pemilihan MRP terlalu cepat diselenggarakan dan terkesan dipaksakan, sementara pihak lain menilai proses pemilihan MRP justru berjalan sangat lambat. Rupanya kedua penilaian ini bertitik tolak pada sudut pandang berbeda tetapi tidak menjelaskan secara jelas inti perbedaan penilaian tersebut. Di kalangan masyarakat adat, hal yang sama juga dimunculkan dan sekali lagi membuat masyarakat bertambah bingung menentukan sikap.

2. Agenda Dewan Adat Papua 15 Agustus 2005

Pada 19 Juli 2005 DAP menyelenggarakan konferensi pers di Kafe Prima Garden Abepura Kabupaten Jayapura dan menyampaikan kepada publik rencana mengembalikan Otsus Papua kepada pemerintah 15 Agustus 2005. Tentu saja rencana DAP ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Mengapa DAP ingin kembalikan Otsus dan apa kewenangannya? DAP menilai Otsus Papua telah gagal mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat adat Papua karenanya Otsus harus dikembalikan. Sikap DAP ini mendapat tanggapan dari Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Laksamana Madya Djoko Sumaryono bahwa sikap DAP kurang tepat dan apa yang DAP lakukan bukanlah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua. Jika pelaksanaan Otsus belum berjalan dengan baik perlu evaluasi secara bersama-sama untuk mencari letak kekurangannya. Sementara Gubernur Papua Drs. Jaap Solossa, M.Si sedikit kecewa dengan

penilai DAP bahwa Otsus Papua sama sekali gagal dan tidak berhasil. Menurutnya Otsus bukan gagal tetapi belum berjalan secara optimal.

Bagi masyarakat sikap DAP bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah informasi yang berkembang seputar 15 Agustus 2005, seperti Sekjen PBB akan datang ke Jayapura untuk menyerahkan hasil penelitian sejarah Papua dan sekaligus mengumumkan menyerahkan kedaulatan rakyat Papua. Tanggal 15 Agustus 2005 Papua akan merdeka dan semua masyarakat pendatang harus segera keluar dari Papua. Berita-berita inilah yang berkembang dan mewarnai dinamika sosial politik Papua pada Agustus 2005.

Tentu saja berita seperti ini mengelisahkan banyak pihak terutama karena mengganggu upaya perdamaian dan penanganan konflik yang sudah dijaga selama ini. Maka LP3BH Manokwari mengeluarkan Surat Terbuka mengenai perkembangan situasi Papua dan secara khusus mengenai rencana aksi DAP 15 Agustus 2005 berserta isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. Pemimpin agama di Papua juga mengeluarkan seruan yang ditujukan kepada berbagai pihak berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari lapangan mengenai isu seputar 15 Agustus 2005, adanya upaya memecah belah masyarakat dengan mengeksploitasi perbedaan-perbedaan, Otsus Papua yang mengalami pergeseran makna yang mengakibatkan kekecewaan masyarakat bahkan menimbulkan kemarahan dan rasa tidak percaya pada pemerintah, dan rencana DAP untuk mengerahkan massa dalam jumlah besar. Sementara dari pihak pemerintah, Gubernur Papua, Drs. Jaap Solossa, M.Si menghimbau kepada masyarakat agar jangan terlalu takut dan cemas, tetap menjalankan tugas masing-masing seperti biasa.

Rencana aksi DAP 15 Agustus secara khusus juga menarik perhatian aparat keamanan. Di tingkat lokal Papua Irjen Pol Drs. D. Sumantyan, HS, SH memberikan bantuan 2 regu Brimob yang diterima langsung oleh Kapolres Jayapura, AKBP Robert Djoenso guna menambah barisan keamanan baik menjelang aksi maupun pada hari aksi dilakukan. Sementara di tingkat Nasional Kapolri Jendral Pol Susanto segera datang ke Jayapura dan secara khusus mengingatkan DAP agar aksi damai pengembalian Otsus Papua nanti tetap berada dalam bingkai NKRI. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. D. Sumantyan, HS, SH, beserta jajarannya mengadakan rapat tatap muka dengan pihak DAP di Aula Rupatama Polda Papua. Kedua belah pihak bersepakat untuk menjaga keamanan aksi secara bersama-sama.

Situasi yang berkembang dan tanggapan dari berbagai pihak ternyata menjadi bahan pertimbangan yang cukup efektif bagi DAP. DAP kemudian menggeser hari pelaksanaan aksi damai dari 15 Agustus ke tanggal 12 Agustus 2005 karena menyadari perkembangan situasi yang ada dan secara khusus mau menghormati hari kemerdekaan RI 17 Agustus 2005. Langkah DAP memajukan jadwal aksi ke 12 Agustus 2005 adalah suatu langkah bijaksana yang paling tidak mencerminkan kesungguhan DAP untuk menyelesaikan persoalan Papua secara damai dan bermartabat.

Aksi pengembalian Otsus Papua oleh Masyarakat Adat adalah salah satu dari seluruh rangkaian kegiatan selama sepekan yang diselenggarakan oleh DAP. Pada 6 Agustus DAP membuka sidang pleno di STT GKI I.S. Kijne di Abepura untuk membahas sejauhmana Otsus Papua berdampak pada masyarakat Adat selama 2-3 tahun terakhir. Pada tanggal 9 DAP juga memperingati Hari Pribumi Sedunia di Sentani.

Ketakutan bahwa akan terjadi kekacauan ketika DAP bersama masyarakat mengembalikan Otsus Papua tidak terbukti. Aksi sendiri berjalan lancar. Beberapa toko di pinggiran jalan raya sempat ditutup dan lalu lintas di jalan raya juga sepih tetapi masyarakat tetap dapat pergi kemana-mana. Isu pribumi-pendatang yang semula ditakutkan seperti lenyap. Karena selama massa melakukan aksi berjalan kaki dari Abepura menuju Kota Jayapura justru masyarakat bukan Papua yang banyak menyediakan minuman di pinggir jalan. Ada kesan dalam masyarakat juga bahwa aksi ini menjadi semacam hiburan bagi masyarakat sehingga para aksi damai disambut dengan sorak-sorai sambil memberikan minuman selama perjalanan.

3. RUU Amerika Serikat H.R. 2601

Kebijakan Amerika Serikat seperti yang tertuang dalam RUU H.R.2601 tentang Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat khususnya pasal 1115 tentang Aceh dan Papua, mengundang reaksi tegas pemerintah RI. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bahwa tidak senang dengan sikap Parlemen Amerika yang seakan-akan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia bersikap dingin saja. Hal ini membuat DPR RI merasa kecewa dan meminta pemerintah agar tidak menganggap remeh apa yang dibuat oleh Parlemen Amerika Serikat. DPR RI bahkan mengusulkan agar pemerintah segera membentuk tim lobi untuk menggugurkan poin yang menyinggung tentang Papua dalam RUU Amerika Serikat. DPR RI juga mengusulkan agar Pemerintah RI berkolaborasi dengan pelobi-pelobi tingkat dunia guna menyelesaikan persoalan RUU H.R.2601.

Ide penyelesaian persoalan RUU Amerika Serikat melalui lobi tingkat tinggi diterima baik oleh berbagai kalangan namun keanggotaan tim lobi masih saja mendapat catatan-catatan. Ada yang menginginkan agar komponen dari Papua perlu dilibatkan tetapi ada yang tidak terlalu memperdulikan unsur Papua. Sedangkan dikalangan masyarakat dan pemerintah Papua, ide untuk bergabung sebagai anggota tim pelobi tidak mendapat tanggapan serius.

Informasi mengenai RUU Amerika Serikat H.R.2601 ternyata tersebar dalam masyarakat Papua secara luas. Terhadap penyebaran informasi kepada masyarakat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kecewa. Presiden mengharapkan agar informasi seperti ini tidak perlu disebarluaskan karena akan mengganggu apalagi masyarakat mulai menafsirkan sesuka hati. Tetapi dari sudut pandang hak asasi manusia, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi⁵ secara benar. Persoalannya adalah apakah informasi itu benar. Walaupun demikian pemerintah tidak berusaha untuk

⁵ Deklerasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 19.

memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tetapi hanya marah dan menghujat sikap Palemen Amerika Serikat.

Media massa di tingkat Jakarta sempat menyinggung tanggapan Pemerintah Republik Indonesia terhadap RUU Amerika Serikat H.R.2601 dan berbeda dengan media lokal di Papua yang cenderung diam. Informasi yang tersebar dalam masyarakat didapat dari media nasional terutama melalui internet. Terkesan media lokal di Papua acuh tak acuh dan tidak peduli dengan situasi yang berkembang di Papua. Padahal RUU Amerika Serikat H.R. 2601 mengundang banyak cerita di kalangan masyarakat Papua dan cukup membingungkan. Jika melihat sikap media masa di Papua, pantaslah hal ini dipertanyakan.

3. Hukum dan Peradilan

Solidaritas Masyarakat untuk Kasus Abepura mendatangi DPRP dan mendesak semua pihak yang berkepentingan menyelesaikan kasus Abepura untuk bersama sama mendorong proses peradilan di Makassar agar putusan yang akan diambil pada 8-9 September 2005 tidak memihak dan tetap mengedepankan rasa keadilan terhadap korban. Terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan diminta agar dihukum seberat-beratnya. Aksi kemudiaan dilanjutkan dengan mogok makan selama tiga hari di halaman kantor DPRP Jayapura-Papua.

Suara masyarakat kecil di Republik Indonesia hampir pasti selalu kalah bila berhadapan dengan para penguasa. Pada tanggal 8 September 2005, Pengadilan HAM Makassar memutuskan bahwa Brigjend Pol Johny Wainal Usman, pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Abepura Papua dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Tanggal 9 September putusan yang sama juga diberikan kepada Kombes Pol Daud Sihombing, SH.

Putusan pengadilan HAM kasus Abepura menambah cacatan pengalaman buruk bagi hukum dan peradilan di Indonesia. Pengadilan terhadap kasus HAM Abepura adalah pengadilan HAM ke-3, dimana pada semua pengadilan tersebut membebaskan para pelaku kejahatan kemanusiaan. Putusan-putusan yang diambil dalam pengadilan HAM merupakan gambaran kelam hukum dalam peradilan Indonesia. Orang sipil tidak berseragam dan tidak bersenjata selalu menjadi korban terhadap hukum dan sistem peradilan; sementara orang berseragam terus memperlak hukum untuk menghukum masyarakat kecil.

Terlepas dari persoalan kasus HAM, kasus korupsi juga mendapat perhatian luas media surat kabar di Papua. Bupati Jayawijaya, Drs. David Hubi diperiksa sebagai saksi di Mapolda Papua. Dari keterangan selama memberi kesaksian, Drs. David Hubi dinyatakan sebagai tersangka korupsi untuk kasus pembelian pesawat secara fiktif.

B. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Kompensasi kenaikan harga BBM

Kebijakan pemerintah menaikkan BBM bukanlah barang baru. Beberapa tahun terakhir harga BBM terus naik bahkan untuk tahun 2005, BBM dinaikkan 2 kali. Dimana-mana masyarakat protes tetapi pemerintah seperti tidak ambil pusing terhadap keluhan masyarakat. Di Jayapura misalnya mahasiswa berdemonstrasi menolak kenaikan BBM dan minta agar para petinggi Pertamina segera diperiksa, karena ada indikasi bahwa mereka juga penyebab kerugian negara yang berdampak pada penderitaan rakyat Indoensia. Para mahasiswa juga meminta agar pemerintah Provinsi Papua mengeledah semua agen minyak dan apabila terdapat penimbun minyak, segera menghukum seberat-beratnya. Terhadap semua itu Gubernur Papua, Drs. Jaap Solossa, M.Si meminta kepada masyarakat Papua memaklumi kebijakan pemerintah menaikkan BBM.

Walaupun kebijakan menaikkan BBM baru akan terlaksana per-1 Oktober 2005 dampaknya sudah terlihat misalnya di Sentani Kabupaten Jayapura. Banyak kendaraan antri 1 hari sebelum harga BBM dinyatakan naik secara resmi. Sebagai akibat sebagian masyarakat kecil pengguna perahu motor tempel di Danau Sentani memalang stasium penyisian bahan bakar karena melarang masyarakat membeli minyak bensin dengan menggunakan jerigen.

Untuk Tahun 2005 kebijakan pemerintah menaikkan BBM sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelum karena ada semacam penggantian kerugian masyarakat. Pemerintah menyebutnya sebagai kompensasi BBM. Sepertinya pemerintah menyadari bahwa dengan kenaikan BBM, berdampak luas pada aspek kehidupan masyarakat yang lain dan tentunya ini memberatkan masyarakat kecil. Pemerintah juga menyadari bahwa aspek mendasar seperti kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas dari kompensasi BBM yang diberikan untuk tahun 2005. Diharapkan dengan bantuan dana kompensasi tersebut beban masyarakat kecil sedikit diringankan. Berkaitan dengan itu 12.834 kampung di Provinsi Papua mendapat bantuan kompensasi BBM. Wilayah kampung yang banyak mendapat bantuan kompensasi BBM adalah Kabupaten Jayawijaya sebanyak 59 kampung, Kabuapten Yahukimo sebanyak 59 kampung, Kabupaten Tolikara sebanyak 53 kampung dan Merauke sebanyak 50 kampung. Sedangkan Kabupaten lain rata-rata 40-an kampung yang dibantu. Dengan gambaran bantuan kompensasi BBM di atas Provinsi Papua terkesan sebagai Provinsi miskin di Indonesia.

Karena Kompensasi diperuntukan untuk masyarakat kecil atau miskin maka perlu mengetahui berapa orang miskin yang mesti dan layak menerima bantuan. Berkaitan dengan itu di Provinsi Papua juga dilakukan semacam sosialisasi pendataan masyarakat miskin seperti yang lakukan oleh pemerintah Kota Jayapura. Akan tetapi siapakah orang miskin dan indikasi mana dipakai untuk menentukan orang miskin dan kaya. Indikasi ini penting agar dana kompensasi tersebut benar sampai kepada masyarakat yang sungguh-sungguh membutuhkannya.

2. Hak atas pendidikan

Berkaitan dengan pendidikan, menurut Wakil Kepala P dan P Provinsi Papua, Drs. James Mandouw, Pemerintah Pusat mengucurkan dana kompensasi untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Provinsi Papua sebesar 55 Miliar rupiah. Untuk menyalurkan dana tersebut perlu data mengenai jumlah sekolah dan berapa anak sekolah yang digolongkan sebagai anak miskin. Hampi pasti bahwa data seperti ini ada, apakah sekolah tersebut berjalan atau tidak, mungkin punya cacatan tersendiri. Tetapi jika melihat sekolah-sekolah di daerah yang sulit dijangkau, banyak guru sering tidak ada di tempat misalnya seperti yang dikeluhkan masyarakat Kemtuk Gresik di Kabupaten Jayapura dan di Aprawi Distrik Sinopi, Kabupaten Manokwari. Sebenarnya ini gambaran persekolahan di pinggiran kota dan di daerah pedalaman di Papua.

Aspek tenaga pendidik di pinggiran kota atau pedalaman terus menjadi persoalan dari tahun ke tahun. Ada semacam penyakit yang rupanya pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab terhadap sekolah tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah. Gaji para pengajar sering tidak dibayar dan menjadi borok besar yang tidak mampu disembuhkan. Para guru honorer terpaksa harus memprotes pihak penyelenggara sekolah karena honor mereka selama berbulan-bulan belum di bayar. Fenomena yang sama sebenarnya juga dialami oleh tenaga pendidik yang tercacat sebagai pegawai negeri sipil. Sialnya dengan alasan mengurus gaji para guru sering berada di kota berbulan-bulan.

Terlepas dari persoalan para pendidik dan persoalan pihak penyelenggara persekolahan, anak didik sering menjadi korban. Terhadap pendidikan, semua pihak turut bertanggung jawab memajukan pendidikan di Papua tetapi yang paling bertanggungjawab adalah negara⁶ bahwa negara berkewajiban memnuhi segala kebutuhan dasar warga negaranya.⁷

Sudah pasti bahwa semua sekolah di Papua mendapat dana BOS termasuk sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah pedalaman yang sering ditinggalkan para guru dengan berbagai alasan. Jika mengatakan dana BOS diperuntukan untuk membantu anak didik yang miskin agar bisa bersekolah, daerah-daerah pedalaman hampir seratus persen layak mendapat dana ini, bukan saja karena kenyataan bangunan secara fisik dan fasilitas penunjang lain yang sangat memprihatinkan tetapi juga karena biaya untuk melanjutkan pendidikan lanjut sering menjadi masalah. Distrik Kwiyawage Kabupaten Jayawijaya menjadi salah satu contoh buruknya perhatian terhadap pendidikan di wilayah terpencil.

⁶ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 26 ayat 1 dan 2, Konvenan Internasional Hak Ekosob, pasal 13 ayat 2, poin a-e dan Konvensi tentang hak anak pasal 28, ayat 1, poin a dan b. UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Bab. XVI, pasal 56 ayat 1.

⁷ 3 bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya: (1) menghormati (obligation to respect), (2) melindungi (obligation to protect) dan ketiga, pemenuhan (obligation to fulfil). Lihat Ildhal Kasim, 2001, " Perihal Perintah Global Menegakkan Hak Asasi Manusia", dalam: Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional bagi Aparatur Penegak Hukum, Jakarta; Elsam.

Dana kompensasi BMM yang dikucurkan atas nama masyarakat Papua jumlahnya puluhan miliar rupiah. Perlu adanya pengawasan agar dana-dana tersebut sampai kepada masyarakat yang dikatakan sebagai masyarakat miskin. Bagus kalau ada semacam kontrol berkala dari penanggung jawab entah pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat independen yang secara teratur memberikan laporan bulanan. Kontrol semacam ini penting untuk selain mengetahui dari dekat apakah dana itu sampai pada sasaran, misalnya pada sekolah-sekolah di pedalaman dan juga bagaimana dana tersebut dikelola secara bertanggung jawab. Perlu adanya sistem kontrol yang tepat. Sistem penilik sekolah jaman Pemerintahan Belanda kiranya menjadi salah satu model kontrol yang cukup efektif, dimana para pejabat pendidikan tidak duduk di tempat dan menyelesaikan persoalan administrasi kantor saja tetapi terlibat langsung di lapangan. Ini salah satu bentuk tanggung jawab moral yang selama ini kurang diperhatikan bahkan tidak ada sama sekali. Apa artinya UU RI No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengalokasikan dana 30 % dari total pendapatan Provinsi Papua untuk pendidikan⁸ jika bentuk pertanggung jawaban moral tidak ada sama sekali ? Apa artinya dana BOS 55 miliar rupiah untuk memajukan pendidikan di Papua jika tidak ada kontrol yang benar ? Tinggalkan gaya kontrol serimonial dan mulailah dengan sistem yang benar. Untuk mengontrol tidaklah perlu dengan rombongan "sirkus" karena hanya menghamburkan uang negara.

3. Hak atas kesehatan

Sama seperti pendidikan, Pemerintah Pusat juga memberikan dana kompensasi BBM untuk membantu sektor kesehatan, agar dengan dana tersebut kesehatan masyarakat Papua lebih diperhatikan lagi. Dana tersebut disalurkan lewat dinas kesehatan melalui Asuransi Kesehatan (Askes). Agar dana tersebut sampai pada sasaran, diperlukan data yang akurat tentang orang miskin. Berkaitan dengan itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Merauke, drg. Joseph Rinta, R.M, jumlah orang miskin di Kabupaten Merauke 77.930 dari jumlah total penduduk 172.000 jiwa, sementara yang telah mendapatkan Askes berjumlah 43.784 jiwa. Dan sekitar 34 ribu jiwa belum mendapat Asuransi Kesehatan. Pertanyaannya mengapa 34 jiwa belum mendapat Asuransi Kesehatan sedangkan telah terdata sebagai orang miskin ?

Persoalan kesehatan untuk Provinsi Papua bukan barang baru. Banyak masyarakat tidak mendapat pelayanan medis secara wajar. Hal seperti itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat Pulau Undi dan Pulau Pasi Kabupten Biak Numfor karena tidak ada tenaga medis pada 2 Puskesmas mereka. Soal kekurangan tenaga medis memang menjadi kendala bukan saja di tingkat daerah kabupaten seperti di Kabupaten Biak Numfor tetapi juga di RSUD Dok II yang menjadi barometer pelayanan kesehatan di Wilayah Provinsi Papua. Menurut Kepala RSUD Dok II Jayapura, dr. Pauline Watopa bahwa RSUD Dok II Jayapura hanya mempunyai 17 dokter dari 50 dokter yang seharusnya ada pada rumah sakit sebesar RSUD Dok II.

⁸ Baca UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Bab. XI pasal 36 ayat 2.

Terhadap kinerja pelayanan kesehatan di Provinsi Papua, Komisi IX DPR melakukan kunjungan kerja ke RSUD Dok II Jayapura. Dalam kunjungan tersebut Komisi IX DPR RI menanyakan tentang upaya pelayanan medis kepada masyarakat dan berapa alokasi biaya yang disiapkan untuk pelayanan tersebut. Kepada pihak Diskes Provinsi Papua dianjurkan agar pelayanan kepada masyarakat kecil di pedalaman harus lebih diperhatikan mengingat pelayanan medis di daerah terpencil hampir tidak tersentuh. Anjuran seperti yang disampaikan oleh Komisi IX DPR RI sudah sering terdengar di berbagai kesempatan oleh pejabat atau lembaga-lembaga terhormat lainnya tetapi hasil di lapangan selalu sama saja.

Pasti sebagian masyarakat terkejut mendengar kabar bahwa Kabupaten Asmat terserang wabah muntaber di 5 wilayah distrik yaitu Distrik Sawa-Erma, Distrik Pantai Kasuari, Distrik Akat, Distrik Atsy dan Distrik Fayit dan menyebabkan 25 balita meninggal dunia. Jika merujuk pada keterangan Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Tohab Capa, masyarakat terserang muntaber karena mengonsumsi air kotor. Artinya bahwa tidak tersedia air bersih bagi masyarakat, padahal air adalah kebutuhan primer yang seharusnya tersedia. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab dan wajib memenuhi kebutuhan dasar warganya berupa air bersih.

Ketika berbagai pihak membicarakan mengenai kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat, malah para perawat sendiri mengadakan aksi protes terhadap kepemimpinan dan kebijakan interen rumah sakit. Di RSUD Manokwari para perawat melakukan mogok kerja dengan cara memalang Unit Gawat Darurat (UGD). Tindakan ini dilakukan karena para perawat tidak puas dengan kebijakan pembagian uang pelayanan pada unit-unit RSUD Manokwari. Para dokter dan perawat di RSUD Abepura Kabupaten Jayapura juga melakukan protes kepada Direktur RSUD Abepura karena dinilai bekerja kurang profesional dan selalumenjadi biang keributan di lingkungan RSUD Abepura Kabupaten Jayapura. Pemandangan demonstrasi sebenarnya hal yang lazim bagi masyarakat sekarang. Akan tetapi jika itu dilakukan oleh instansi pelayanan publik seperti rumah sakit, rasanya kurang etis karena menyangkut nyawa manusia secara langsung, walaupun memprotes atau menyampaikan pendapat adalah hak semua orang.

4. Penyebaran HIV/AIDS

Dalam triwulan Juli-September 2005, surat-surat kabar di Papua tidak banyak menyinggung tentang upaya pengendalian HIV/AIDS atau kenyataan penyebaran HIV/AIDS di Papua. Bikda Provinsi Papua dalam kerjasama dengan Aksi Stop AIDS (ASA) melakukan penyuluhan di pasar Inpres Dok IX, Kelurahan Tanjung Ria Jayapura Utara. Dalam penyuluhan juga diputar film Mencari Madona. Sementara di Kabupaten Biak Numfor menurut pengawas HIV/AIDS Diskes Biak Numfor, Ruslan SKM, telah mencapai tingkat penyebaran yang cukup tinggi. Data terakhir yang dikeluarkan oleh Sub Dinas P2M PL Diskes Juli 2005, mencatat jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 93 kasus. Dan kini jumlah tersebut meningkat menjadi 110 kasus setelah selama Agustus 2005 ditemukan 17 kasus baru.

Berkaitan dengan penyebaran HIV/AIDS di Papua berbagai upaya sedang dilakukakan untuk menghambat laju virus tersebut. Akan tetapi, sepertinya semua upaya sia-sia. Di Kabupaten Biak Numfor misalnya hanya selang satu bulan saja sudah ditemukan lagi 17 kasus baru. Sebenarnya apa yang dilakukan baik oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga yang peduli dengan virus yang bakal membunuh sebagai masyarakat Papua ini?

5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan

Lebih dari 600-an petani PIR PTPN II Arso berunjuk rasa ke kantor DPRP dan menuntut agar Pemerintah dan instansi terkait memperhatikan standar harga Tandan Buah Segar (TBS) yang setara dengan harga di luar Provinsi Papua. Petani yang tergabung dalam Forum Peduli Nasib Petani sebenarnya adalah gabungan dari beberapa kelompok bersama Asosiasi Petani kelapa Sawit Indonesia (APKASIDO). Menarik bahwa dalam aksi ini pemimpin umat terlibat mengumuli persoalan ketidakadilan yang dialami oleh umat dan masyarakat petani di lingkungannya.

Menurut Kasubdin Bina Pendayagunaan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Drs. Yusuf Serang, jumlah pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua mencapai 98.156 orang. Apakah masih ada yang belum tercatat ? Bisa saja bahwa masih banyak masyarakat pencari kerja yang belum tercatat. Di kampung-kampung masih bisa temukan cukup banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap. Artinya bahwa jumlah masyarakat Papua yang belum mendapatkan pekerjaan lebih dari 98.156 orang seperti yang dicatat pada Dinas Tenaga Kerja.

Persoalan tenaga kerja atau pengangguran di Papua tidak akan berkurang malah akan bertambah jika pemerintah tidak mengontrol jumlah penduduk yang masuk di Papua. Pemerintah Papua dalam hal ini harus mengambil sikap tegas dan tidak perlu merasa takut dengan penilaian dari luar karena Papua mempunyai Otsus Papua yang memungkinkan berbagai kebijakan bisa diambil. Pemerintah perlu kembangkan pusat-pusat pertanian karena mayoritas masyarakat Papua adalah petani. Tanpa usaha-usaha serius masyarakat Papua akan menjadi penonton di rumahnya sendiri.
